



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 36/Bua.2/Kp.04.1/6/2020  
Lampiran : -  
Hal : Pedoman Usul Kenaikan Pangkat  
Non KPO Periode Oktober 2020

5 Juni 2020

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI
  2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding
  3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama
- di  
Tempat

Dalam rangka proses usul Kenaikan Pangkat Non KPO periode Oktober 2020 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap operator SIKEP Pengadilan Tingkat Banding dan Eselon I agar segera melakukan verifikasi dan validasi nama-nama Pegawai yang naik pangkat periode Oktober 2020 pada menu Administrasi Pegawai >> Administrasi >> KP STRUKTURAL dan segera melengkapi data beserta e-doc pada SIKEP paling lambat tanggal 3 Juli 2020.
2. Data dan e-doc yang perlu dilengkapi pada SIKEP adalah :
  - a. SK Pangkat terakhir
  - b. SK Jabatan Terakhir
  - c. SPMT, SPMJ dan SPP Jabatan Terakhir
  - d. SKP Tahun 2018 dan 2019
  - e. Ijasah Terakhir beserta transkrip nilai dan Surat Ijin Belajar
  - f. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat II
  - g. Sertifikat Diklat PIM IIIDokumen yang diupload harus jelas, lengkap dan tidak terpotong.
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat proses verifikasi dan validasi pada Aplikasi SIKEP antara lain:
  - a. Data yang diusulkan adalah **pegawai Golongan IV/a ke atas yang menduduki jabatan struktural Non Teknis;**
  - b. Pejabat Struktural Eselon III.a dan III.b yang naik pangkat dari Gol. III/d ke IV/a bukan karena pendidikan S2, wajib menginput STLUD/ Sertifikat Diklat PIM III beserta e-docnya di SIKEP;
  - c. SKP 2 (dua) tahun terakhir yang dapat diajukan proses Non KPO setiap unsurnya wajib **bernilai baik;**
  - d. Pengisian NIP dan nama atasan langsung pada menu SKP SIKEP harus sesuai dengan yang tertulis pada e-doc SKP, jika atasan langsung pada saat itu berasal dari instansi luar, maka data yang diisi adalah pejabat saat ini;
  - e. Data gelar;
  - f. pendidikan pada SIKEP harus sesuai dengan data SAPK BKN.

4. Apabila dalam batas waktu tersebut satuan kerja tidak melakukan verifikasi dan validasi serta masih ditemukan data yang belum lengkap, maka **Kenaikan Pangkatnya tidak akan diproses pada periode Oktober 2020.**

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Kepala Biro Kepegawaian,



Tembusan:  
Sekretaris Mahkamah Agung RI.